

LAPORAN TAHUNAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2020**



PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN

KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN



Keberadaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik; (2) kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana.

Dalam rangka meningkatkan pengelolaan dan peningkatan pelayanan informasi, salah satu kewajiban Badan Publik yang terkait dengan implementasi UU No. 14 Tahun 2008 adalah wajib menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

Pemerintah Kabupaten Madiun telah menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 85 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Madiun, Peraturan Bupati tersebut merupakan landasan operasional bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam mengimplementasikan Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Madiun sebagaimana diatur dalam UU KIP No. 14 Tahun 2008.

PPID bertanggung jawab melakukan penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, pelayanan, dan pengamanan informasi publik. Dalam menjalankan tugas fungsinya, PPID dibantu oleh para petugas layanan informasi.

Guna mempercepat penanganan permohonan layanan informasi di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Madiun, PPID menetapkan 9 (Sembilan) SOP Pengelolaan Layanan Informasi Publik yang terdiri dari: (1) SOP Pelayanan Informasi Yang dikuasai dan Diberikan; (2) SOP Pelayanan Informasi Yang dikuasai dan Diberikan (by email); (3) SOP Pelayanan Informasi Yang dikuasai Unit Kerja; (4) SOP Penyusunan Daftar Informasi Publik; (5) SOP Uji Konsekuensi Informasi Publik dan Penetapan Daftar Informasi Dikecualikan; (6) SOP Penanganan Pengajuan Keberatan Informasi Publik; (7) SOP Penanganan Sengketa Informasi Publik; (8) SOP Penyediaan dan Pengunggahan Informasi Publik pada Portal; (9) SOP Petugas Desk Layanan Informasi Publik.

Selain SOP, petugas layanan juga diberikan panduan berupa Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK).

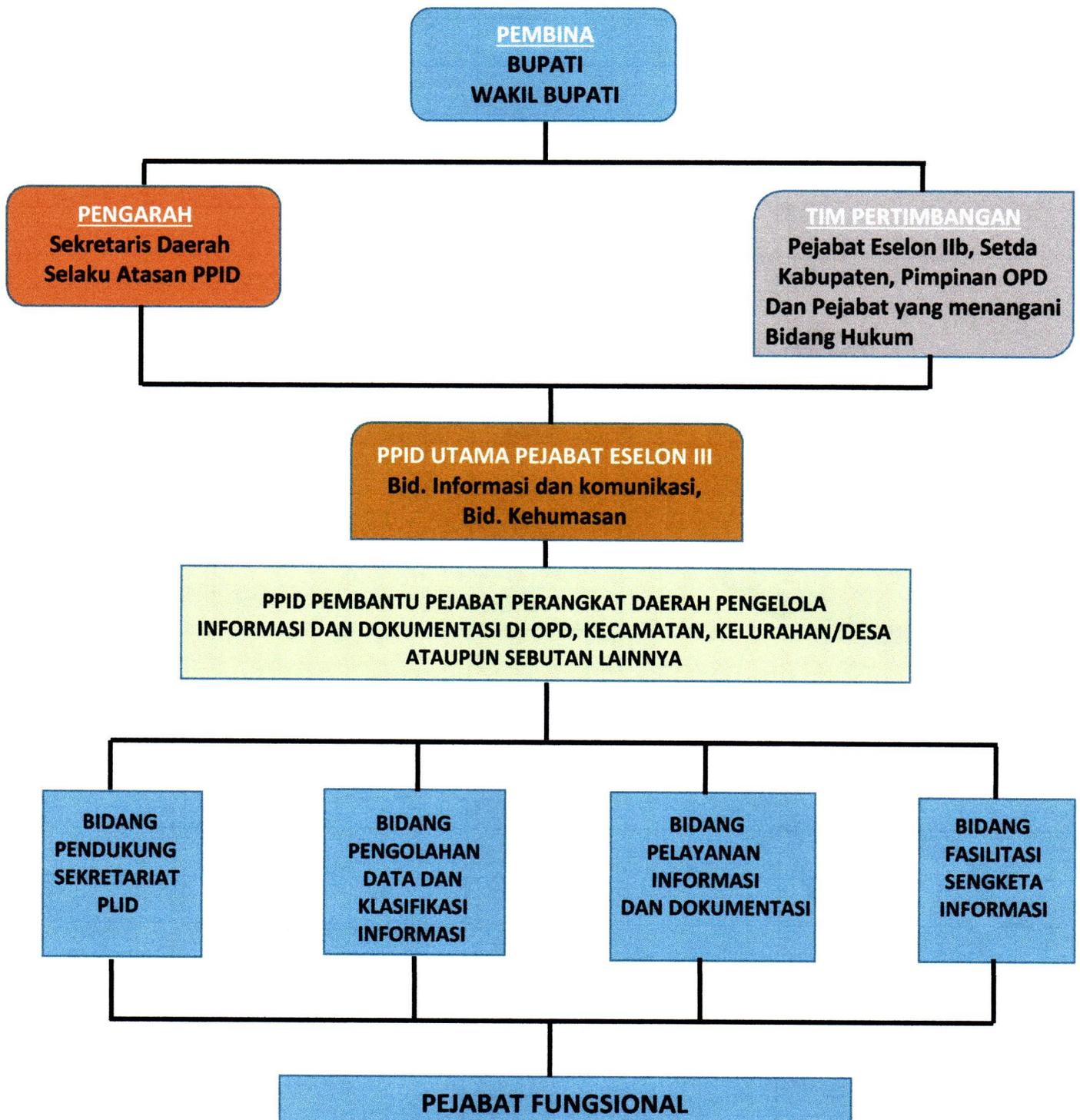
Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) bersifat dinamis dan dapat dimutakhirkan setiap saat, apabila diperlukan, terkait dengan jangka waktu pengecualian dan/ atau sifat suatu informasi dan/atau terdapat penambahan atau pengurangan data.

SESUAI LAMPIRAN : PERBUP MADIUN

NOMOR : 85

TANGGAL : 31 DESEMBER 2018

**STRUKTUR ORGANISASI
PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PLID KABUPATEN)**



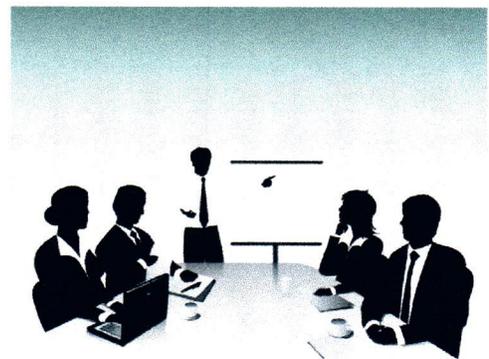
GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Kelengkapan fasilitas Desk Layanan Informasi Publik

Guna memperlancar pelayanan informasi publik, PPID menyediakan ruang dan meja layanan informasi publik yang dilengkapi dengan perangkat pendukung layanan antara lain pesawat telepon, komputer untuk petugas layanan dan pengunjung, dan kursi tunggu. Pemohon yang ingin menyampaikan permintaan informasi secara langsung dapat mendatangi ruang layanan informasi tersebut.

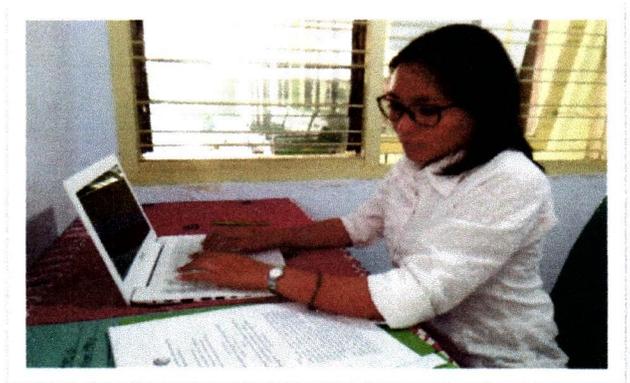
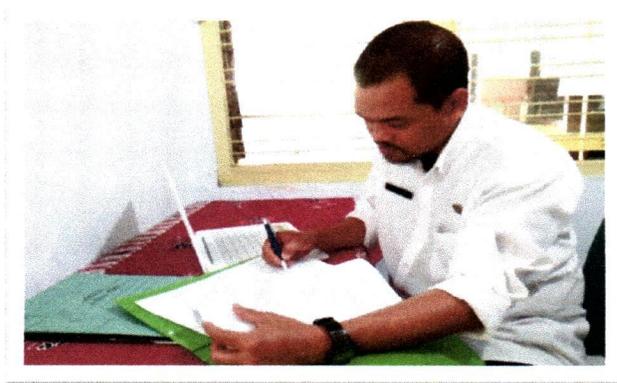


1. 2 Meja dan Kursi Front Desk sebanyak 2 buah
2. 1 Unit PC Unit terkoneksi dengan internet



3. 1 Unit Telepon dan Faximile
4. 1Unit Air Conditioner
5. Daftar Informasi Publik
6. Formulir transaksi layanan informasi publik, antara lain :
 - a. Formulir permintaan informasi publik;
 - b. Formulir tanda bukti penerimaan permintaan informasi publik;
 - c. Formulir tanda bukti penyerahan informasi publik;
 - d. Formulir pemberitahuan tertulis;
 - e. Formulir pengajuan keberatan.

SARANA PRASARANA PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

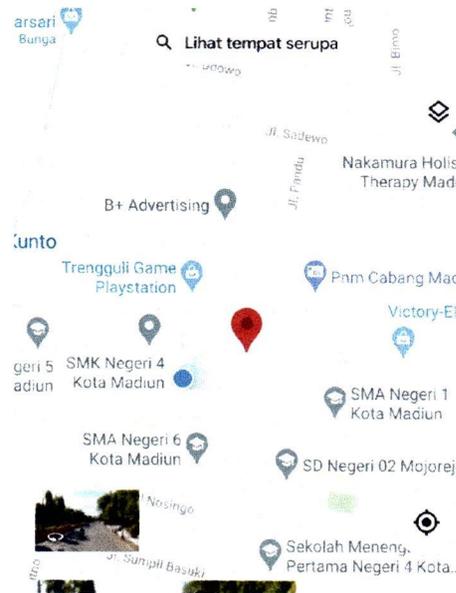


• Foto Layanan Informasi Publik

Disamping penyediaan ruang dan meja layanan informasi, untuk mengakomodir kepentingan publik dalam mengakses layanan permohonan informasi, Diskominfo juga menyediakan akses layanan permohonan informasi PPID melalui [aplikasi online E-PPID yang tersedia di website https://madiukab.go.id](https://madiukab.go.id). Pemohon Informasi dapat dengan mudah mengakses layanan permohonan informasi secara online melalui website E-PPID, kemudian permohonan informasi yang diterima secara online tersebut diproses melalui layanan back office oleh petugas layanan PPID. Selain akses tersebut, bagi masyarakat yang hendak menyampaikan pertanyaan umum berkaitan dengan tugas fungsi Pemerintahan Daerah Kabupaten Madiun dapat juga melalui layanan telepon.

**JALUR DAN WAKTU
PELAYANAN INFORMASI PUBLIK**

JALUR DAN WAKTU LAYANAN



**Alamat PPID Pemerintah Kab. Madiun
Jl. Mastrip No. 23 Madiun Kota**

**Telp : (0351) 462 927
Fax : (0351) 448 7016 – 448 7017**

Website : <https://madiunkab.go.id>

Email :

Jam Layanan Informasi

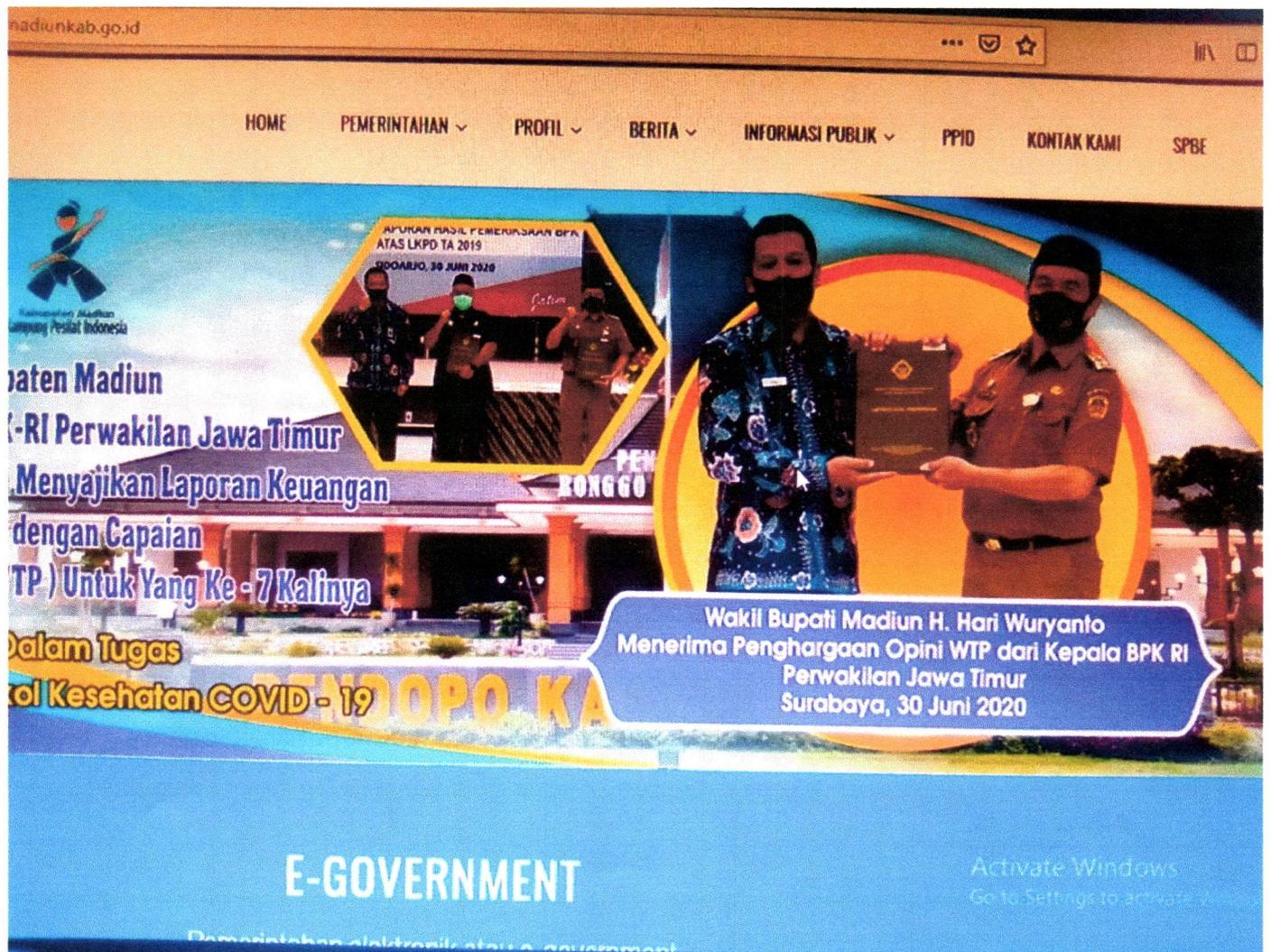
**JAM KERJA : Hari Senin s.d Kamis
08.00 - 12.00 WIB
Hari Jum'at
08.00 – 10 WIB**

Operasional pelayanan permohonan informasi publik dilaksanakan setiap hari kerja mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 12.00 WIB.

Akses layanan permohonan informasi PPID melalui aplikasi online E-PPID yang tersedia di website : <https://madiunkab.go.id/>

PENYEDIAAN INFORMASI PUBLIK

Selama tahun 2020, PPID Pemerintah Kabupaten Madiun telah memutakhirkan konten informasi publik pada website resmi PPID Pemerintah Kabupaten Madiun <https://madiunkab.go.id>, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 9, 10, dan 11 UU KIP Nomor 4 Tahun 2008 mengenai informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan serta-merta, dan informasi yang wajib tersedia setiap saat.



Website PPID

SUMBER DAYA PENGELOLA LAYANAN INFORMASI

Dalam melaksanakan dan mengelola layanan informasi publik, PPID Pemerintahan Kabupaten Madiun didukung oleh 2 (dua) Tim Kerja Harian yang melibatkan seluruh satuan kerja di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Madiun yaitu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Madiun Nomor 188.45/355/KPTS/402.013/2019 Tanggal 23 Mei 2019 dan Pengelola layanan Informasi dan Dokumentasi pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama Surat Keputusan Bupati Madiun Nomor : 188.45/439/KPTS/402.013/2019 Tanggal 18 Juli 2019 untuk mengoptimalisasi layanan informasi publik pada Pemerintahan Kabupaten Madiun.

Mengingat pentingnya sinergi pengelolaan PPID di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Madiun, PPID beserta koordinator PPID mengadakan rapat guna melihat perkembangan layanan PPID dan mengumpulkan masukan dari masing-masing koordinator PPID untuk perbaikan layanan informasi publik agar lebih maksimal. Tidak hanya bersinergi di lingkungan internal, PPID Pemerintahan Kabupaten Madiun juga berpartisipasi aktif pada Forum Koordinasi PPID (FKPPID) bersama dengan PPID Pemerintahan/Lembaga lainnya. Sedangkan untuk peningkatan kualitas pelayanan, PPID melaksanakan beberapa kali kegiatan Sosialisasi yang berkaitan dengan keterbukaan informasi dan layanan informasi dengan menghadirkan narasumber dari Komisi Informasi, dan Pembina Tingkat Provinsi.

DAFTAR PELAKSANAAN KEGIATAN SOSIALISASI PPID DI KABUPATEN MADIUN

No	Tanggal	Kegiatan	Keterangan
1.	10 Nopember 2018	Sosialisasi tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	- Di Ruang Rapat Diskominfo Kab.Madiun
2.	21 Oktober 2019	Sosialisasi PPID bagi OPD	- Di Ruang Puspem Kab.Madiun
3.	22 Oktober 2019	Sosialisasi PPID bagi Desa	- Diruang Puspem kab. Madiun
4.	17 Agustus 2020	Rapat Forum Komunikasi PPID OPD	- Di Ruang Rapat Diskominfo Kab. Madiun

ANGGARAN PENGELOLAAN LAYANAN INFORMASI

Seluruh pembiayaan dalam pelaksanaan tugas PPID dibebankan pada DPA Pemerintah Kabupaten Madiun Dinas Komunikasi dan Informatika

NO.	KEGIATAN	FREKUENSI	PELAKSANAAN	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5
1	Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik (Pertemuan)	12 Bulan	Jan s.d Des 2020	4.525.000,00
				4.525.000,00

RINCIAN PELAYANAN PERMOHONAN

Selama Tahun 2020, PPID Pemerintahan Kabupaten Madiun belum menerima **Aduan** dari pemohon baik dari Lembaga maupun masyarakat secara individu.

Untuk Pemohon Informasi aduan tersebut dapat disampaikan melalui Desk Layanan Informasi Publik PPID Pemerintah Kabupaten Madiun yang beralamat di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Madiun Jalan. Mastrip Nomor 23 Kota Madiun, maupun secara online melalui Website : <https://madiunkab.go.id>

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI RINGKASAN LAPORAN AKSES INFORMASI PUBLIK TAHUN 2020 MELALUI DESK LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Bulan	Jumlah		waktu		Status Permohonan			Alasan Penolakan
	Permohonan	Permintaan	Jam	Menit	Pemberian	Penolakan	Proses	
Januari	-	-	-	-	-	-	-	-
Pebruari	-	-	-	-	-	-	-	-
Maret	-	-	-	-	-	-	-	-
April	-	-	-	-	-	-	-	-
Mei	-	-	-	-	-	-	-	-
Juni	-	-	-	-	-	-	-	-
Juli	-	-	-	-	-	-	-	-
Agustus	-	-	-	-	-	-	-	-
September	-	-	-	-	-	-	-	-
Oktober	-	-	-	-	-	-	-	-
Nopember	-	-	-	-	-	-	-	-
Desember	-	-	-	-	-	-	-	-

Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Sepanjang tahun 2020 tidak terjadi sengketa informasi publik. PPID Pemerintahan Kabupaten Madiun memenuhi semua permintaan informasi publik sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan ketentuan turunannya.

Capaian PPID Tahun 2020

Selama tahun 2020 beberapa capaian PPID Pemerintahan Kabupaten Madiun belum pernah mendapatkan dan belum pernah mengikuti beberapa event-event penilaian dalam rangka kegiatan monitoring dan evaluasi Keterbukaan Informasi Publik.

Kendala

Beberapa kendala dalam pelaksanaan layanan informasi publik di Pemerintahan Kabupaten Madiun adalah sebagai berikut :

1. Pemahaman terhadap UU KIP belum secara optimal merata di seluruh unit kerja;
2. Koordinator Unit Kerja Eselon II yang ditunjuk belum semua berkontribusi secara maksimal, sehingga data dan informasi dari setiap Unit Kerja belum tersedia secara lengkap di Desk Layanan PPID;
3. Pengelolaan database PPID dan Unit Kerja Eselon II yang masih manual;
4. Kendala teknis pada Layanan E-PPID, menyebabkan alur permintaan informasi, verifikasi pemohon dan pengiriman informasi yang diminta pemohon tidak dapat dilaksanakan melalui aplikasi E-PPID.

SURAT KEPUTUSAN PPID PEMBANTU OPD KABUPATEN MADIUN

Untuk memperjelas tanggung jawab pelaksanaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Pemerintahan Daerah Kabupaten Madiun masing-masing Organisasi Perangkat Daerah telah memiliki Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas, Badan, Instansi dan BUMD antara lain :

No	Nama OPD	Nomor SK	Ket
1	2	3	4
	<u>OPD</u>		
1	Dinas Komuinfo dan Informatika	188/323/KPTS/403.103/2019	
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	188.45/05/KPTS/402.104/2020	
3	Dinas Pariwisata, Pemuda dan OR	067/22/KPTS/402.112/2019	
4	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	188.45/169/KPTS/402.105/2019	
5	Inspektorat	188.45/63/402.060/2020	
6	Sekretariat DPRD	188.45/06/KTSP/402.040/2020	
7	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	188.45/0039/KPTS/402.115/2020	
8	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	188.4/05/KPTS/402.106/2020	
9	Dinas Perhubungan	067/24/402.108/2019	
10	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	420/0149/402.107/2019	
11	Dinas Kesehatan	188.4/1101/KPTS/402.102/2019	
12	Dinas Tenaga Kerja	188.4/13/KPTS/402.114/2020	
13	Dinas Pendukcapil	1 Tahun 2020	
14	Dinas Pertanian dan Perikanan	067/48/KPTS/402.109/2020	
15	Dinas Lingkungan Hidup	188.45/38/KPTS/402.117/2020	
16	Dinas Sosial	188.4/09/402.111/2020	
17	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	49 Tahun 2019	
18	Dinas Ketahanan Pangan	067/1980/402.116/2019	

19	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	16 Tahun 2020	belum
20	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)	188/6A/KPTS/402.119/2020	
21	Dinas Perpustakaan	188.45/...../KPTS/402.113/2020	
22	SETDA Kabupaten Madiun	-----	

	<u>BADAN</u>		
23	Badan Kepegawaian Daerah	067/01/402.201/2020	
24	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	067/1092/402.031/2020	
25	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	188/4382/KPTS/402.202/2019	
26	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	188.45/051/402.302/2010	
27	Badan Pendapatan Daerah	188.4/20/402.204/2020	
28	Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah	900/151/402.203/2020	
	<u>KECAMATAN</u>		
29	Kecamatan Pilengkeng	188.45/01/402.411/2019	
30	Kecamatan Jiwan	188.45/1276/KPTS/402.406/2019	
31	Kecamatan Mejayan	40 Tahun 2019	
32	Kecamatan Sawahan	188.45/01/KPTS/402.412/2020	
33	Kecamatan Madiun	188.45/16/KPTS/402.409/2020	
34	Kecamatan Dagangan	814.04/KPTS/402.402/2019	
35	Kecamatan Kare	188.45/56/KPTS/402.408/2020	
36	Kecamatan Wonoasri	188.45/18/KPTS/402.415/2019	
37	Kecamatan Dolopo	26 Tahun 2019	
38	Kecamatan Wungu	067/182A/402.414.01/2019	
39	Kecamatan Gemarang	01 tahun 2020	
40	Kecamatan Geger	25 tahun 2019	
41	Kecamatan Saradan	188.4/11/KPTS/402.413/2019	
42	Kecamatan Kebonsari	30 tahun 2019	
43	Kecamatan Balerejo	22 tahun 2019	
	<u>KELURAHAN</u>		
44	Kelurahan Mlilir	188.45/01/KPTS/402.01/2010	
45	Kelurahan Krajan	09 Tahun 2019	
46	Kelurahan pandean	16 Tahun 2019	
47	Kelurahan Bangunsari	13 tahun 2019	
48	Kelurahan Munggut	188/10/KPTS/402.414.02/2019	
49	Kelurahan Nglames	11 Tahun 2019	
50	Kelurahan Bangunsari	188.45/04/KPTS/402.403.02/2020	
51	Kelurahan Wungu	067/182A/402.414.01/2019	
	<u>BUMD</u>		
52	PDAM Tirta Dharma Purabaya	54/KPTS/PDAM/MDN/XII/2019	
53	RSUD Caruban	188.4/448/KPTS/402.102.110/2019	
54	Umbul Square	188.4/53/402.503/2019	
55	RSUD Dolopo	188.45/879.A/402.102.120/2019	
56	BPR	007/1062/402.401/2029	

Alamat Web PPID OPD Pembantu

No	Nama OPD	Alamat Web PPID OPD Pembantu	Ket
1	2	3	4
	<u>OPD</u>		
1	Dinas Komuinfo dan Informatika	diskominfo.madiunkab.go.id	
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	dpupr.madiunkab.go.id	
3	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	disparpora.madiunkab.go.id	
4	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	dpmd.madiunkab.go.id	
5	Inspektorat	inspektorat.madiunkab.go.id	
6	Sekretariat DPRD	setwan.madiunkab.go.id	
7	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	perdagkop.madiunkab.go.id	
8	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	dpmpstsp.madiunkab.go.id	
9	Dinas Perhubungan	perhubungan.madinkab.go.id	
10	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	dindik.madiunkab.go.id	
11	Dinas Kesehatan	dinkes.madiunkab.go.id	
12	Dinas Tenaga Kerja	disnaker.madiunkab.go.id	
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	dukcapil.madiunkab.go.id	
14	Dinas Pertanian dan Perikanan	diperkan.madiunkab.go.id	
15	Dinas Lingkungan Hidup	dlh.madiunkab.go.id	
16	Dinas Sosial	dinsos.madiunkab.go.id	
17	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	perkim.madiunkab.go.id	
18	Dinas Ketahanan Pangan	dkpp.madiunkab.go.id	
19	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	dppkbpppa.madiunkab.go.id	
20	Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)	polpp.madiunkab.go.id	
21	Dinas Perpustakaan	perputakaan.madiunkab.go.id	
22	SETDA Kabupaten Madiun	setda.madiunkab.go.id	

	<u>BADAN</u>		
22	Badan Kepegawaian Daerah	bkd.madiunkab.go.id	
23	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	kesbangpol.madiunkab.go.id	
24	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	bappeda.madiunkab.go.id	
25	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	bpbd.madiunkab.go.id	
26	Badan Pendapatan Derah	bapenda.madiunkab.go.id	
27	Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah	bpkad.madiunkab.go.id	
	<u>KECAMATAN</u>		
28	Kecamatan Pilengkenceng	pilangkenceng.madiunkab.go.id	
29	Kecamatan Jiwan	Jiwan.madiunkab.go.id	
30	Kecamatan Mejayan	mejayan.madiunkab.go.id	
31	Kecamatan Sawahan	sawahan.madiunkab.go.id	
32	Kecamatan Madiun	madiun.madiunkab.go.id	
33	Kecamatan Dagangan	dagangan.madiunkab.go.id	
34	Kecamatan Kare	kare.madiunkab.go.id	
35	Kecamatan Wonoasri	wonoasri.madiunkab.go.id	
36	Kecamatan Dolopo	dolopo.madiunkab.go.id	
37	Kecamatan Wungu	wungu.madiunkab.go.id	
38	Kecamatan Gemarang	gemarang.madiunkab.go.id	
39	Kecamatan Geger	geger.madiunkab.go.id	
40	Kecamatan Saradan	saradan.madiunkab.go.id	
41	Kecamatan Kebonsari	kebonsari.madiunkab.go.id	
42	Kecamatan Balerejo	balerejo.madiunkab.go.id	
	<u>KELURAHAN</u>		
43	Kelurahan Mlilir	-----	Belum
44	Kelurahan Krajan	-----	Belum
45	Kelurahan pandean	-----	Belum
46	Kelurahan Bangunsari	-----	Belum
47	Kelurahan Munggut	-----	Belum
48	Kelurahan Nglames	-----	Belum
49	Kelurahan Bangunsari	-----	Belum
50	Kelurahan Wungu	-----	Belum
	<u>BUMD</u>		
51	PDAM Tirta Dharma Purabaya	-----	Belum
52	RSUD Caruban	-----	Belum
53	Umbul Square	rsudcaruban.madiunkab.go.id	
54	RSUD Dolopo	-----	Belum
55	BPR	rsuddolopo.madiunkab.go.id	

Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut

Rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi PPID adalah sebagai berikut :

1. Workshop dan Bimbingan Teknis mengenai UU KIP lebih ditingkatkan lagi bagi pengelola dan koordinator unit kerja Eselon II di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Madiun;
2. PPID terus bersinergi melakukan koordinasi dan pembinaan terkait Keterbukaan Informasi Publik kepada Koordinator PPID Unit Kerja Eselon II dan Koordinator PPID pada Simpul Layanan PPID di UPT Daerah, agar mempercepat dalam merespon dan memberikan jawaban atas permintaan informasi publik mengingat waktu yang sangat terbatas untuk disampaikan kepada pemohon informasi;
3. Pengembangan aplikasi layanan E-PPID dan pengelolaan database informasi PPID.

Demikian laporan tahunan secara ringkas ini disusun sebagai bahan evaluasi layanan informasi publik PPID Pemerintahan Kabupaten Madiun.

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN MADIUN

Selaku

**Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama
Pemerintahan Kabupaten Madiun**



Dra. SAWUNG REHTOMO, Msi